

### G. BELANJA APBD LAINNYA

Belanja APBD lainnya merupakan belanja APBD Tahun 2018 yang dilaporkan sebagai bagian dari pelaporan pertanggungjawaban Bupati yang tidak dilaporkan dalam pembagian urusan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, namun dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Belanja APBD lainnya masuk dalam pos belanja tidak langsung APBD.

Pada tahun 2018, belanja tidak langsung dikelola oleh BPPKAD selaku PPKD. Selengkapnya belanja APBD lainnya adalah sebagai berikut;

#### a. Alokasi Belanja Tidak Langsung

Pemerintah daerah kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp.1.072.153.744.966,00**. Dari anggaran tersebut dapat teralisasi sebesar **Rp.1.002.446.630.564,00** atau **sekitar 93%**. Alokasi belanja tidak langsung yang dikelola oleh PPKD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. IV.G.2.1**  
**Ringkasan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018**  
**Belanja Tidak Langsung**

| URAIAN                                                                                     | ANGGARAN                 | REALISASI                | %         | LEBIH / (KURANG)        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 1.                                                                                         | 2.                       | 3.                       | 4         | 5                       |
| <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                                              | <b>1.072.153.744.966</b> | <b>1.002.446.630.564</b> | <b>93</b> | <b>(69.707.114.402)</b> |
| Belanja Pegawai                                                                            | 761.947.256.966          | 693.912.697.564          | 91        | (68.034.559.402)        |
| Belanja Hibah                                                                              | 16.572.600.000           | 15.806.635.000           | 95        | (765.965.000)           |
| Belanja Bantuan Sosial                                                                     | 7.560.500.000            | 7.065.500.000            | 93        | (495.000.000)           |
| Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa                      | 5.107.990.000            | 5.107.990.000            | 100       | 0                       |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik | 275.965.398.000          | 275.594.848.000          | 100       | (370.550.000)           |
| Belanja Tidak Terduga                                                                      | 5.000.000.000            | 4.958.960.000            | 99        | (41.040.000)            |

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo Tahun 2018

#### b. Alokasi dan Realisasi Belanja APBDesa

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Sebelum diterbitkannya UU ini anggaran desa masih bertumpu pada APBD, namun setelah dikeluarkannya undang-undang ini desa sudah bisa dikatakan mandiri, tidak tergantung pada APBD, namun demikian

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah kabupaten/ kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tidak dapat dipungkiri kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang masih didominasi dengan daerah administrasi desa dengan jumlah total desa 236 sedangkan kelurahan 29, oleh karena itu keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan APBDes tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. III.G.2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  
Pelaksanaan APBDes Tahun 2018**

| KODE REKENING | URAIAN                                                                                | ANGGARAN (Rp.)         | REALISASI (Rp.)        | LEBIH/ KURANG (Rp.)   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1             | 2                                                                                     | 3                      | 4                      | 5                     |
| <b>1</b>      | <b>PENDAPATAN</b>                                                                     |                        |                        |                       |
| 1 1           | <i>Pendapatan Asli Desa</i>                                                           | 23.386.786.540         | 23.017.357.848         | 369.428.692           |
| 1 2           | <i>Pendapatan Transfer</i>                                                            | 309.634.205.000        | 305.670.600.389        | 3.963.604.611         |
| 1 3           | <i>Pendapatan Lain lain</i>                                                           | 257.916.562            | 792.573.132            | (534.656.570)         |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                              | <b>333.278.908.102</b> | <b>329.480.531.369</b> | <b>3.798.376.733</b>  |
| <b>2</b>      | <b>BELANJA</b>                                                                        |                        |                        |                       |
| 2 1           | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>                                       | 100.817.261.345        | 96.753.957.132         | 4.063.304.213         |
| 2 2           | <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>                                            | 174.095.734.494        | 160.805.731.041        | 13.290.003.453        |
| 2 3           | <i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>                                                | 9.365.879.943          | 9.172.804.739          | 193.075.204           |
| 2 4           | <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>                                                 | 55.860.898.137         | 53.954.629.227         | 1.906.268.910         |
| 2 5           | <i>Bidang Tak Terduga</i>                                                             | 371.413.876            | 126.518.665            | 244.895.211           |
|               | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                                 | <b>340.511.187.795</b> | <b>320.813.640.804</b> | <b>19.697.546.991</b> |
|               | <i>SURPLUS / DEFISIT</i>                                                              | (7.232.279.693)        | 8.666.890.565          | (15.899.170.258)      |
| 3             | PEMBIAYAAN                                                                            |                        |                        |                       |
| 3 1           | <i>Penerimaan Pembiayaan</i>                                                          | 10.473.812.757         | 9.863.097.075          | 610.715.682           |
| 3 2           | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i>                                                         | 3.241.533.064          | 2.750.115.688          | 491.417.376           |
|               | - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN –PENGELUARAN PEMBIAYAAN )                   | 7.232.279.693          | 7.112.981.387          | 119.298.306           |
|               | - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT) | -                      | 15.779.871.952         | (15.779.871.952)      |

Sumber: Bagian Pemerintahan SETDA, 2018